

BAB 1.

Depok Sebuah Kota Tanpa Masa Lalu

1.1 Pembangunan Tanpa Memperhatikan Sejarah

Kota Depok bertransformasi menjadi kota modern dengan sangat cepat. Namun, pembangunan Kota Depok seakan melupakan identitas dan memori masyarakatnya. Banyak bangunan bersejarah (cagar budaya) di daerah Depok Lama yang dihancurkan dan dialihfungsikan tanpa menyisakan bentuk aslinya. Banyak bangunan beralih fungsi menjadi pertokoan, kios, rumah makan, dan fasilitas komersil lainnya. Oleh karena itu, perkembangan budaya, tradisi, dan heterogenitas masyarakat Depok semakin terkikis oleh perkembangan zaman yang tidak terarah.

Di sisi lain, Depok merupakan kota yang sarat akan sejarah. Pada awalnya Depok merupakan tanah perkebunan

yang dimiliki oleh seorang pejabat tinggi VOC, Cornelis Chastelein yang dibeli pada 18 Mei 1691. Perkebunan ini merupakan salah satu perkebunan pertama di Indonesia yang dikembangkan mandiri oleh perseorangan. Chastelein mempekerjakan ratusan pekerja yang didatangkan dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa, Pulau Rote, serta Filipina. Selain mengelola perkebunan, Chastelein juga menyebarkan agama Kristen kepada para pekerjanya melalui Padepokan Kristiani yang ia miliki. Padepokan ini bernama De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen, yang disingkat menjadi DEPOK. Pada akhir hayatnya Cornelis Chastelein memerdekakan dan memberi tanah serta harta kekayaan yang ia miliki kepada para budaknya dengan syarat budak-budak tersebut menaati ajaran agama Kristen (Kano, 2004). Para budak Chastelein merupakan penduduk pertama Kota Depok yang saat ini dikenal dengan 'Kaum Depok Lama' atau 'Belanda Depok'.

Perkebunan ini terus berkembang dari hanya rumah para budak yang merdeka (*mardijker*) menjadi sebuah desa, hingga pada 1871 Pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok membentuk Pemerintahan dan Presiden sendiri setingkat *Gemeente* (Desa Otonom). *Gemeente* Depok diperintah oleh seorang presiden sebagai badan pemerintahan tertinggi. Di bawah kekuasaannya, terdapat kecamatan yang membawahi mandat (9 mandor) dan dibantu oleh pecalang polisi desa serta kumitir atau menteri lumbung. Pada 1952, terjadi proses nasionalisasi daerah dan perjanjian pelepasan hak antara Pemerintah

RI dengan pimpinan Gemeente Depok, tetapi tidak termasuk tanah-tanah Elgendom dan beberapa hak lainnya (Jonathans, 2011).

Sejak saat itu, dimulailah pemerintahan Kecamatan Depok yang berada dalam lingkungan kewedanaan (pembantu bupati) wilayah Parung, yang meliputi 21 desa. Pada 1976 melalui proyek perumahan nasional di era Orde Baru, dibangunlah Perumnas Depok I dan Perumnas Depok II. Pembangunan tersebut memicu perkembangan Depok yang lebih pesat sehingga akhirnya pada 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok yang peresmiannya dilakukan pada 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud). Kota Depok terus berkembang hingga menjadi kota modern yang dapat dilihat saat ini.

Berdasarkan penjabaran singkat sejarah Kota Depok tersebut, tentulah banyak tinggalan bangunan bersejarah yang menjadi saksi biksi perkembangan dan modernisasi kota ini (lihat gambar 1). Di sepanjang Jalan Pemuda saja terdapat bangunan-bangunan yang berasal dari abad ke-18 hingga masa sebelum kemerdekaan, seperti Gereja GPIB Imanuel, Gedung Eben Haezer, sekolah pribumi zaman belanda (kini menjadi SDN Pancoran Mas 2), Kantor YLCC, dan gedung Pemerintahan Depok (kini menjadi Rumah Sakit Harapan). Bangunan-bangunan ini merupakan monumen dan pengingat masa lalu Kota Depok sebagai kota Kristen pertama dan industri perkebunan tertua di Indonesia (Prasidha, Martokusumo, & Lubis, 2016).



Gambar 1. Rumah Sakit Harapan Merupakan Kantor Pemerintahan Masa Kolonial

Akan tetapi, sangat disayangkan pembangunan dan modernisasi Kota Depok menyebabkan beberapa permasalahan bagi bangunan bersejarah di Kota Depok. Berdasarkan laporan dari koran *Pikiran Rakyat* tanggal 5 Oktober 2017 mengabarkan bahwa hampir 75% bangunan bersejarah di Kota Depok sudah beralih fungsi menjadi pertokoan, kios, rumah makan, dan fasilitas komersil lainnya (Arifianto, 2017). Bahkan, pada akhir 2017 mencuat berita tentang penggusuran rumah peristirahatan Gubernur Jenderal VOC untuk pembangunan sebuah universitas. Selain itu, beberapa bangunan yang tersisa sudah mulai hancur termakan waktu yang banyak diberitakan di media massa (lihat gambar 2). Pemerintah Kota Depok tampaknya belum

memperhatikan pentingnya melestarikan bangunan bersejarah yang ada di Kota Depok. Padahal, bangunan-bangunan ini mengandung nilai identitas, budaya, sejarah, dan memori kolektif masyarakat Depok. Apabila hal ini tidak diperhatikan, bangunan-bangunan ini akan hilang dan Kota Depok kehilangan identitas dan sejarah masa lalunya.



Gambar 2. Kumpulan Artikel terkait Bangunan Bersejarah di Depok

Sejumlah aksi protes dari masyarakat dan pemerhati sejarah telah melakukan protes terkait hal ini. Salah satunya adalah Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC). YLCC adalah yayasan yang didirikan oleh Kaum Depok Lama atau keturunan 12 marga eks budak tuan tanah Cornelis Chastelein. YLCC bertugas mengoordinasikan kedua belas marga tersebut untuk merawat aset-aset yang merupakan warisan Cornelis Chastelein serta

merawat bukti-bukti peninggalan sejarah. Salah satu anggota YLCC, Ferdy Jonathans telah mengusulkan beberapa daftar bangunan tua untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Namun, tampaknya hal ini belum menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok.

Padahal, bangunan bersejarah tidak hanya bersifat sebagai memori dan memenuhi kebutuhannya sebagai pengingat masa lalu, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara memanfaatkan cagar budaya adalah melalui pariwisata. Sebagai contoh daerah Kota Tua Jakarta dan Jalan Braga di Bandung menjadi destinasi pariwisata dan menambah pemasukan kas daerah. Selain itu, kedua kawasan ini juga menjadi ikon *landmark* dan menjadi sentra budaya bagi kedua daerah ini.

1.2 Peran Cagar Budaya dalam Konteks Pembangunan

Bangunan bersejarah dalam ilmu arkeologi termasuk dalam kategori cagar budaya. Menurut UU No. 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah benda, bangunan, situs, ataupun kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Selain itu, cagar budaya juga dapat diartikan sebagai benda buatan manusia dalam bentuk apa pun yang memiliki hubungan erat dengan suatu kebudayaan

dan sejarah perkembangan manusia.

Cagar budaya dengan nilainya sebagai identitas bangsa dan mengandung nilai budaya, sejarah, ekonomi, dan memori kolektif, memiliki aspek vital dalam proses pembangunan. Hal ini juga didukung beberapa akademisi dan peneliti yang berpendapat bahwa kawasan cagar budaya dapat memberikan kontribusi langsung kepada pembangunan dan modernisasi suatu daerah melalui potensi yang dimiliki oleh cagar budaya tersebut (Bandarin, Hosagrahar, & Albernaz, 2011; Clark, 2008; Keitumetse, 2011; Throsby, 2001).

Salah satu media untuk memanfaatkan cagar budaya dalam pembangunan adalah melalui pariwisata. Apabila dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai destinasi wisata, cagar budaya dapat berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan daerah tersebut. Sebagai contoh pariwisata kapal karam USAT Liberty di Bali menghasilkan pendapatan daerah Bali lebih dari US\$ 300 juta per tahun, bahkan situs ini merupakan salah satu destinasi kapal karam yang teramai dikunjungi di dunia (Kamaluddin, 2002; Lukman, 2017). Alternatif pendapatan dari pariwisata cagar budaya ini juga dapat mengurangi tingkat eksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral yang saat ini menjadi sumber utama pendapatan negara dan mengurangi tingkat degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangannya (Tampubolon, 2015).

Bila dilihat dalam konteks yang lebih besar seperti Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB tahun 2015 lalu, cagar budaya dapat berkontribusi sebagai berikut:

1. Dimensi Ekonomi

Cagar budaya dapat berperan langsung untuk membangun ekonomi dan devisa negara melalui pariwisata. Berdasarkan data United Nations World Tourism Organisation pada 2015, pariwisata berbasis cagar budaya menghasilkan keuntungan lebih dari 40% (US\$ 1260 billion) dari total turisme secara keseluruhan (United Nations World Tourism Organization, 2016, p. 3).

Hal ini senada dengan pendapat yang dinyatakan oleh Mark Hampton bahwa pariwisata cagar budaya adalah salah satu industri yang berkembang pesat di seluruh penjuru dunia dan digunakan oleh banyak negara sebagai strategi memodernisasi dan mengembangkan pembangunan negara (Hampton, 2005, p. 736).

Sebagai contoh Kamboja merehabilitasi kawasan Angkor sebagai ujung tombak pariwisata Kamboja. Pada 2010 tercatat pariwisata Angkor menghasilkan keuntungan senilai US\$ 1.700 juta dan menghasilkan lebih dari 400 ribu lapangan kerja bagi masyarakat lokal (Bandarin et al., 2011, p. 18).

2. Dimensi Sosial

Dimensi sosial dari tujuan pembangunan berkelanjutan menitikberatkan kepada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh manusia dengan cara menaikkan pendapatan minimum individu serta memperbaiki kesetaraan sosial dan kohesi sosial (Tweed & Sutherland, 2007, pp. 63–64). Cagar budaya dapat memainkan peran yang krusial dalam rangka mengharmonisasi hubungan sosial antarmasyarakat dan meningkatkan kepercayaan diri individu dikarenakan cagar budaya merupakan sumber identitas dan kebanggaan masyarakat sekitarnya.

Program yang dilakukan UNESCO dalam Earthern Architecture Conservation Project di Afrika pada 2008–2012 merupakan salah satu contoh nyata cagar budaya berkontribusi memperkuat dimensi sosial tujuan pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2011). Hal ini dikarenakan proyek ini menitikberatkan untuk melibatkan dan mendidik wanita di daerah tersebut dalam program konservasi ini. Hal ini dikarenakan wanita dalam konteks kebudayaan masyarakat yang menjadi daerah program UNESCO masih dipandang sebelah mata dan program ini memberikan wadah bagi para wanita untuk bekerja. Program ini mendemonstrasikan bagaimana cagar budaya dapat berkontribusi dalam kesetaraan gender.

3. Dimensi Lingkungan

Sudah diketahui secara umum bahwa tidak ada pembangunan yang tidak berdampak terhadap lingkungan. Perubahan lanskap area, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam merupakan efek samping dari modernisasi suatu bangsa (Bandarin et al., 2011, p. 20). Namun, dengan mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya dapat memberikan solusi untuk mengatasi degradasi lingkungan tersebut.

Salah satu contoh nyata dalam hal ini adalah penghidupan kembali sistem kanal di kawasan Angkor berdasarkan kajian arkeologi dan sejarah (Hang Peou, Ishwaran Natarajan, Hong Tianhua, & Delanghe Philippe, 2016, pp. 144–148). Pembangunan pesat di Provinsi Siem Reap untuk memenuhi kebutuhan pariwisata menyebabkan banyak permasalahan yang salah satunya adalah banjir. Ketika para peneliti arkeologi Kamboja menemukan jalur kanal yang berada pada masa kejayaan Angkor, Pemerintah Provinsi Siem Reap mengusulkan untuk menghidupkan kembali jalur kanal tersebut. Hasil dari revitalisasi kanal mengurangi musibah banjir secara signifikan (Hang Peou et al., 2016, p. 148).

Melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh cagar budaya, juga disadari oleh organisasi internasional untuk membuat payung hukum internasional dan operasional